
**PENCEGAHAN FRAUD PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KABUPATEN BADUNG DITINJAU DARI PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN WHISTLEBLOWING
SYSTEM**

Putu Mika Amritha¹, Gde Herry Sugiarto Asana², Made Christin Dwitrayani³

^{1,2,3}Universitas Triatma Mulya

Email: mikamritha@gmail.com¹, herry.sugiarto@triatmamulya.ac.id²,
christin.dwitrayani@triatmamulya.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, *good corporate governance* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini dilakukan pada pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung dengan sampel penelitian yang berjumlah 36 responden yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Seluruh data yang diperoleh dari distribusi kuisioner layak digunakan, selanjutnya dianalisis menggunakan uji regresi linier berganda, uji hipotesis parsial (uji t) dan uji kelayakan model (uji f). hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung. hal ini menunjukkan semakin baik atau meningkat penerapan akuntansi sektor publik di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung, maka akan semakin meningkat pula pencegahan *fraud* di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung, (2) *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung. hal ini menunjukkan semakin tinggi atau meningkat *good corporate governance* di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung, maka akan semakin menurun pula pencegahan *fraud* di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung, (3) *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung. hal ini menunjukkan semakin baik atau meningkat *whistleblowing system* di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung, maka akan semakin meningkat pula pencegahan *fraud* di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung.

Kata Kunci: Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System* dan Pencegahan *Fraud*.

Abstract: This research aims to determine impact of the implementation of public sector accounting, good corporate governance, and whistleblowing system on fraud prevention. This research was conducted on employees of the Badung Regency Regional Apparatus Organization (OPD) with a research sample of 36 respondents who were taken using purposive sampling technique. All data obtained from the distribution of questionnaires is feasible to use, then analyzed using multiple linear regression tests, partial hypothesis tests (t tests) and model feasibility tests (f tests). the results showed that (1) the application of public sector accounting has a positive effect on fraud prevention in regional apparatus organizations (OPD) Badung Regency. This shows that the better or more the application of public sector accounting in the

regional apparatus organization (OPD) Badung Regency, the more fraud prevention will increase in the regional apparatus organization (OPD) Badung Regency, (2) good corporate governance has a negative effect on fraud prevention in the regional apparatus organization (OPD) Badung Regency. This shows that the higher or higher the good corporate governance in the regional apparatus organization (OPD) of Badung Regency, the more fraud prevention will decrease in the regional apparatus organization (OPD) of Badung Regency, (3) the whistleblowing system has a positive effect on fraud prevention in the regional apparatus organization (OPD) of Badung Regency. this shows that fraud prevention in the regional apparatus organization (OPD) of Badung Regency will increase.

Keywords: *The Implementation Of Public Accounting Standards, Good Corporate Governance, Whistleblowing System, and The Prevention Of Fraud.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Kabupaten atau Kota merupakan prioritas program pemerintah. Hal ini mengharuskan tiap penyajian laporan keuangan harus tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana kewajiban Pemerintah daerah tersebut diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP menjelaskan mengenai karakteristik dari laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik laporan keuangan haruslah relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam hal pertanggungjawaban, pencapaian hasil kerja suatu instansi dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah. Di Provinsi Bali, daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tertinggi yaitu Kabupaten Badung. Menurut bapenda.badungkab.go.id (12/06/2024) bahwa besarnya defisit APBD di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018. Kabupaten Badung juga berturut-turut mengalami defisit pada tahun 2017-2018. APBD Kabupaten Badung mengalami defisit APBD kabupaten terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Ditinjau dari laman bali.bps.go.id (12/06/2024), sejak 2020 sampai 2022 Kabupaten Badung masih menjadi penyumbang pendapatan asli daerah tertinggi di Provinsi Bali. Kabupaten Badung memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup banyak berasal dari pendapatan pajak maupun dari sektor penjualan hasil daerah dan pariwisatanya. Maka dari itu, dengan PAD yang tinggi akan memicu terjadinya beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari sistem informasi, kinerja pemerintah maupun laporan keuangan pada tahun tertentu. Informasi tentang akuntabilitas kinerja diperlukan untuk bahan pengambilan keputusan guna melakukan segala perbaikan

manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan suatu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi berdampak pada upaya terciptanya *good corporate governance*. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek *fraud* yang terjadi di berbagai instansi Pemerintah.

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan sengaja yang dapat dilakukan oleh seseorang atau bahkan lebih dari satu orang untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau kelompok. Salah satu bentuk kecurangan adalah korupsi. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mengemukakan dari 14 lembaga paling korup, urutan pertama diduduki oleh pemerintah. Kecurangan atau yang sering disebut *fraud* berbeda dengan kesalahan. Kesalahan ialah tindakan yang disebabkan karena ketidaksengajaan. Sedangkan kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan yang didasari atas kesengajaan bahkan hingga membuat rencana untuk melakukan kecurangan tersebut. Siregar dkk (2019) menyatakan bahwa jenis kecurangan yang paling sering ditemukan di Indonesia adalah korupsi dan dampak kerugian yang dihasilkan dari korupsi pun merupakan yang paling besar. Menurut bbs.binus.ac.id (22/09/2023), menyatakan bahwa jenis dan bentuk dari cabang *fraud* selain korupsi yaitu penyimpangan atas aset dan pernyataan palsu atau salah. Pada praktiknya, kecurangan laporan keuangan berarti menyebarkan informasi yang palsu dan telah dimanipulasikan jumlahnya untuk sebuah keperluan yang dibuat secara sengaja atau direncanakan yang memiliki tujuan untuk mengelabui para pengguna informasi laporan keuangan tersebut. Kasus tindakan kecurangan laporan keuangan banyak terjadi di Indonesia, di antaranya banyak terjadi di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra dan Bali.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik merupakan rangkaian kegiatan mencatat, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan lembaga publik atau instansi pemerintah. Institusi di sektor publik menjalankan dan menggunakan sistem akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi sektor publik. Pemerintah daerah, yayasan, partai politik, dan organisasi nirlaba lainnya adalah contoh entitas yang termasuk dalam bidang akuntansi sektor publik di lembaga

tinggi negara. Tujuan dari penerapan akuntansi sektor publik antara lain yakni sebagai *management control* dan sebagai *accountability*. Salah satu jenis akuntansi sektor publik yaitu Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*). Di Negara Indonesia sendiri *fraud* telah ada, salah satunya di bidang akuntansi yang beroperasi di sektor publik. *Fraud* ini merupakan ancaman dalam manajemen suatu akuntansi sektor publik. Dapat mengancam tatanan manajemen yang telah dibangun oleh perusahaan atau lembaga dalam mengelola perusahaannya.

Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Dalam pelaksanaan penerapannya, *Good Corporate Governance* di instansi pemerintahan memerlukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang ada. Instansi atau perusahaan *menerapkan Good Corporate Governance* sebagai prosedur tentang pemahaman suatu aturan yang berlaku untuk meningkatkan kinerjanya, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006).

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kesadaran akan anti kecurangan itu harus mendapat kontribusi dari berbagai pihak agar menciptakan prosedur pencegahan kecurangan yang efektif, membangun organisasi dengan pengendalian yang baik dan meningkatkan kepekaan terhadap tindak dan bahaya kecurangan bagi mutu organisasi yang terjaga. Seperti halnya ketepatan dan kesesuaian tanggung jawab serta wewenang tiap anggota organisasi harus sesuai dengan sistem operasional perusahaan (SOP) instansi masing-masing, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2008).

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan mengenai pencegahan *fraud* dilakukan pada entitas BPR, Lembaga Keuangan maupun di Lembaga non-keuangan. Namun dari uraian diatas terdapat fenomena menarik pada sektor pemerintahan yang harus diteliti, sehingga penelitian ini merupakan *confirmatory reseach* atas topik yang sama dengan objek yang berbeda. Selain itu, variabel *Good Corporate Governance* dan Pengendalian Internal yang dipilih masih belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik menganalisis mengenai

pencegahan *fraud* di sektor pemerintahan yakni di Kabupaten Badung dengan mengangkat judul **“Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung ditinjau dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System*”**.

KAJIAN PUSTAKA

Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory menjelaskan penyebab seorang melakukan *fraud* ada tiga faktor yakni, tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*ratiolization*). *Fraud Triangle Theory* juga menjelaskan seorang dalam suatu instansi melakukan kecurangan karena daya kesempatan dan rendahnya rasionalisasi atau sikap dari para manajemen atau pegawai sehingga ketika melakukan kecurangan mereka selalu mencari pembenaran sendiri, sehingga memperkecil atau meminimalkan kesempatan yang ada adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi sebuah kecurangan. Adapun yang dimaksud dengan adanya tiga faktor yang menyebabkan orang melakukan *fraud* menurut Cressey (1953) yakni:

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan adalah dorongan untuk melakukan kecurangan. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntunan ekonomi dan hal lainnya termasuk keuangan dan non-keuangan yang dirasakan pelaku kecurangan.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan atau peluang adalah situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Kesempatan atau opportunity yang didefinisikan Tuanakotta (2010) sebagai peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan. Mengungkapkan dari penelitian Cressey (1953), pelaku kecurangan selalu memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan tindakan agar tidak terdeteksi.

c. Rasionalisasi (*ratiolization*)

Pembenaran merupakan bagian *fraud triangle* yang paling sulit untuk diukur. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. “Pembenaran merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan

tindakan tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka membenarkan tindakan yang tidak jujur.

Hipotesis Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD0 Kabupaten Badung

Akuntansi sektor public adalah sebuah disiplin ilmu tentang pengolahan dan pelaporan keuangan entitas sektor publik termasuk pemerintahan, Lembaga dan juga badan usaha milik negara. Menurut hasil penelitian Riyanto dan Arifin (2022), menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini juga diperkuat dengan hasil Kristiyani dan Hamidah (2020), menunjukkan penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh secara positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

H1: Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

Hipotesis Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD0 Kabupaten Badung

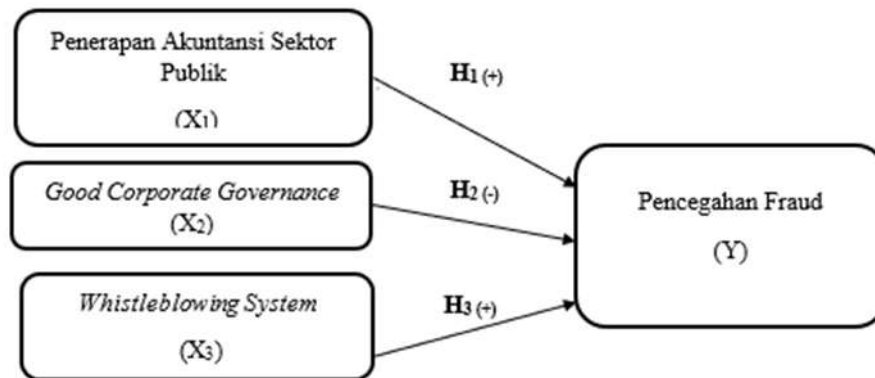
Good corporate governance didefinisikan sebagai tata kelola suatu entitas atau perusahaan yang menekankan bagaimana aktivitas dijalankan, bagaimana Batasan-batasan, hak dan kewajiban sehingga tidak muncul ketimpangan antar instansi. Menurut hasil penelitian Nurfahira dkk (2023), menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Farochi (2022), yang menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negative terhadap pencegahan *fraud*. Dimana saat Tingkat transparansi tata kelola Perusahaan meningkat maka Tingkat kecurangan akan semakin menurun.

H2: *Good corporate governance* berpengaruh negative terhadap pencegahan *fraud*

Hipotesis Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD0 Kabupaten Badung

Whistleblowing system merupakan tindakan untuk penyampaian tindak kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan kepada pihak lain. Menurut hasil penelitian Riyanto dan Arifin (2022), menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* didukung oleh salah satu factor pemicu terjadinya kecurangan pada *fraud triangle theory* yaitu rasionalisasi.

H3: *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*



GAMBAR 3

Kerangka Konseptual

Sumber: Data Diolah, 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sumber data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari webside Pemerintah Kabupaten Badung. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Pegawai tetap (2) Pegawai yang telah bekerja selama 5 tahun atau lebih. Kuesioner ini menggunakan skala likert 1-4. Uji statistic deskriptif, uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, dan uji hepotesis (regresi linier berganda, uji t, dan uji R2) digunakan untuk menguji instrumen penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 berikut menunjukkan hasil uji statistik deskriptif:

TABEL 2

Statistik Deskriptif

No	Keterangan	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		

	Laki – laki	12	33%
	Perempuan	24	67%
Total		36	100%
2	Nama Instansi		
	Dinas Pariwisata	5	14%
	Dinas Sosial	1	3%
	Dinas Kesehatan	2	6%
	Disdikpora	13	36%
	Dishub	2	6%
	Diskerpus	5	14%
	DLHK	2	6%
	DPMP	2	6%
	DPMPTSP	2	6%
	Sekretariat Daerah	2	6%
Total		36	100%
3	Jabatan		
	Administrasi	4	11%
	Ka. Subag Umum	2	6%
	Komisaris Umum	1	3%
	Penata Keuangan	1	3%
	Sarpras	1	3%
	Sekdis	1	3%
	Sekretariat	1	3%
	Staff Keuangan	3	8%
	Staff	21	58%
	Verifikator Keuangan	1	3%

Total		36	100%
4	Masa Jabatan		
	1-5 Tahun	19	53%
	6-10 Tahun	9	25%
	11-15 Tahun	1	3%
	>20 Tahun	7	19%
Total		36	100%
5	Pendidikan Terakhir Responden		
	SMA/SMK		11%
	D3	1	15%
	S1	7	10%
	S2/S3	24	64%
Total		36	100%

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 2 diperoleh informasi bahwa responden dengan masa jabatan atau masa kerja 5 tahun sebanyak 19 orang atau 53% sedangkan responden dengan masa jabatan atau masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 17 orang atau 47%. Berdasarkan jenis kelamin diketahui responden pada penelitian ini

didominasi oleh perempuan sebanyak 24 orang atau 67% dan selanjutnya laki – laki sebanyak 12 orang atau sebesar 33%.

Uji Normalitas

Tabel 3 menunjukkan hasil uji normalitas:

TABEL 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,23684715
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,083
	Negative	-,104
Test Statistic		,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil uji normalitas pada Tabel 3 yang didapatkan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi asymp. Sig sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 menunjukkan hasil uji multikolinearitas:

TABEL 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized	Standardi	t	Sig.	Collinearity
-------	----------------	-----------	---	------	--------------

		Coefficients		zed Coefficien ts			Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Toler ance	VIF
1	(Constant)	3,227	5,441		,59 3	,557		
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	,614	,201	,388	3,0 52	,005	,925	1,081
	<i>Good Corporate Governance</i>	-,311	,090	-,437	- 3,4 59	,002	,934	1,070
	<i>Whistleblowing System</i>	,807	,379	,262	2,1 31	,041	,989	1,011

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Data Diolah 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* memiliki nilai $VIF \leq 10$ dan nilai $tolerance \geq 0,10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas:

TABEL 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,374	2,105		2,078	,046
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	-,016	,109	-,029	-,147	,884
<i>Good Corporate Governance</i>	-,037	,075	-,098	-,497	,622
<i>Whistleblowing System</i>	-,115	,130	-,160	-,882	,384

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber; Data Diolah

Pengujian ini dilakukan dengan Uji *Glejzer*, dimana hasil menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada nilai signifikansi variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik 0,884, *Good Corporate Governance* 0,622, dan *Whistleblowing System* 0,384 hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 berikut menunjukkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda:

TABEL 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,227	5,441		,593	,557
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	,614	,201	,388	3,052	,005
Good Corporate Governance	-,311	,090	-,437	-3,459	,002
Whistleblowing System	,807	,379	,262	2,131	,041

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Data Diolah, 2024

$$\text{Pencegahan } Fraud = 3,227 + 0,614 X_1 - 0,311 X_2 + 0,807 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda yang telah diuraikan sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1). Nilai Konstanta sebesar 3,227 memiliki arti bahwa variabel *Pencegahan Fraud* (Y) memiliki nilai 3,227 jika variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* sama dengan 0.
- 2). Nilai koefisien regresi X_1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik sebesar 0,614 yang berarti bahwa apabila variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik naik 1 satuan, maka variabel dependen, yaitu *Pencegahan Fraud* akan meningkat sebesar 0,614 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.
- 3). Nilai koefisien regresi X_2 *Good Corporate Governance* sebesar 0,311 yang berarti bahwa apabila variabel *Good Corporate Governance* naik 1 satuan, maka variabel dependen,

yaitu *Pencegahan Fraud* akan menurun sebesar 0,311 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

- 4). Nilai koefisien regresi X_3 *Whistleblowing System* sebesar 0,807 yang berarti bahwa apabila variabel *Whistleblowing System* naik 1 satuan, maka variabel dependen, yaitu *Pencegahan Fraud* akan meningkat juga sebesar 0,807 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 7 berikut menunjukkan hasil pengujian kelayakan model:

TABEL 7
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	470,120	3	156,707	11,645	,000 ^b
	Residual	430,630	32	13,457		
	Total	900,750	35			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Good Corporate Governance, Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 Hal ini berarti bahwa model regresi layak dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System*

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 8 berikut menunjukkan hasil pengujian hipotesis:

TABEL 8
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,227	5,441		,593	,557
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	,614	,201	,388	3,052	,005
	<i>Good Corporate Governance</i>	-,311	,090	-,437	-3,459	,002
	<i>Whistleblowing System</i>	,807	,379	,262	2,131	,041

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian didapat hasil sebagai berikut:

1). Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1)

Hasil statistik uji hipotesis untuk variabel penerapan akuntansi sektor publik (X_1) diperoleh nilai t hitung sebesar 3,052 dan nilai koefisien regresi 0,614 dengan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan “Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud* pada OPD Kabupaten Badung diterima”.

2). *Good Corporate Governance* (X_2)

Hasil statistik uji hipotesis untuk variabel *Good Corporate Governance* (X_2) diperoleh nilai t hitung sebesar -3,459 dan nilai koefisien regresi -0,311 dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan “*Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *Fraud* pada OPD Kabupaten Badung diterima”.

3). *Whistleblowing System* (X_3)

Hasil statistik uji hipotesis untuk variabel *Whistleblowing System* (X_3) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,131 dan nilai koefisien regresi 0,807 dengan nilai signifikansi 0,041 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan “*Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud* pada OPD Kabupaten Badung diterima”.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9 berikut menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi:

TABEL 9
Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,722 ^a	,522	,477	3,668

a. Predictors: (Constant), *Whistleblowing System*, *Good Corporate Governance*, Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil perhitungan koefisien determinasi ditunjukkan dari angka *Adjusted R Square* pada Tabel 4.17. Koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* sebesar 0,477 memiliki arti bahwa sebesar 47,7% Pencegahan *Fraud* dipengaruhi oleh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System*. sedangkan sisanya sebesar 52,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan penelitian ini secara umum, sebagai berikut:

- 1) Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerapan akuntansi sektor publik, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan meningkat. Begitu juga

- sebaliknya, semakin rendah penerapan akuntansi sektor publik, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan menurun
- 2) *Good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi *good corporate governance*, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan menurun. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah *good corporate governance*, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan meningkat
- 3) 3). *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi *whistleblowing system*, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah *whistleblowing system*, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan menurun

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht & Zimbelman (2017). *Fraud Examination* (4th ed.). Cengage Learning.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2022. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah) 2020-2022. Tersedia pada https://bali.bps.go.id/indicator/13/244/1/pendapatan-asli-daerah-pad_kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html diakses pada 12 Juni 2024
- Bastian, I. 2015. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. In *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bapenda. 2022. “Rp. 3,1 Triliun, Realisasi PAD Badung 2022, PHR Penyumbang Pendapatan Terbesar”. Tersedia pada <https://bapenda.badungkab.go.id/berita/47049-rp-3-1-triliun-realisisasi-pad-badung-2022-phr-penyumbang-pendapatan-terbesar#:~:text=Rp%203%2C1%20Triliun%2C%20Realisasi,Penyumbang%20Pendapatan%20Terbesar%20%7C%20Bapenda%20Badung> diakses pada 12 Juni 2024
- Badung, Diskominfo. 2023. “Visi dan Misi Kabupaten Badung”. Tersedia pada <https://badungkab.go.id/kab/visimisi>

(diakses pada -5 Oktober 2024)

Binus. 2020. “Jenis fraud dan cabang dari kecurangan yang dapat terjadi di suatu perusahaan”.

Tersedia pada

<https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-fraud/>

diakses pada 12 Juni 2024

Brandon, James R. (2013). Whistle-blowing. Massachusetts: Cambridge University Press.

Corporate Governance. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Creseey. (1953), “A Study In The Social Psychology of Embezzlement”.

Fachrurroji, A. A. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Laporan Keuangan. JAMMI, 1 Nomor 1, 1-11.

Farochi Fauzal Famullah M dan Arief Himmawan Dwi Nugroho. 2022. “Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap pencegahan fraud”. Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 6, Nomer 1(hlm.1-7).

Fakhruddin, H. (2014). Tata Kelola Perusahaan. Di unduh tanggal 16 September 2024, <http://ebook.pmlj.co.id>.

Ghozali, I. (2014). Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis dengan Program SPSS IMB SPSS 23.

Karyono. 2013. Forensic Fraud. Yogyakarta:CV. Andi.

KNKG. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - Spp (Whistleblowing System – WBS).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia

Kurniawan, Ardeno, 2015, Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional, BPFE: Yogyakarta.

Kurniawan Cahyo Pratomo dan Khairina Nur Izzaty. 2019. “Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud”.Journal of economic and banking, Volume 1, Nomor 1(hlm.1-6).

Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN

- FRAUD. ECONBANK: Journal of Economics and Banking, 1(1), 55–60.
<https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.2>.
- Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside, 2(3), 301–316. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Rahayu dkk.2022.”Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud Studi Kasus Pada RSUD Ngimbang”. “Pencegahan fraud menurut Karyono 2013”.
<https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/index.php/melatistiekhad/article/view/3>
- Ratmono dkk.2015.”DAPATKAH TEORI FRAUD TRIANGLE MENJELASKAN KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN?”.Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Nomor 1 (hlm.101-109).
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian & Pengembangan: R&D, Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta,Cv
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfebeta, Cv.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfebeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabet.InSugiyono. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Tuanakotta, T. M. 2010. Akuntansi Forensi dan Audit Investigasi (II). Salemba Empat.